



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 2366 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN KELURAHAN SADAR HUKUM TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menetapkan : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.010 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Kelurahan Sadar Hukum telah dilakukan pembinaan melalui penilaian sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dan memilih 33 (tiga puluh tiga) Kelurahan Sadar Hukum di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta dalam rangka peresmian Kelurahan Sadar Hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Kelurahan Sadar Hukum Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.010 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.010 Tahun 2007;
6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Gubernur Nomor 251 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN KELURAHAN SADAR HUKUM TAHUN 2015.
- KESATU : Menetapkan Kelurahan Sadar Hukum di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Kelurahan yang ditetapkan sebagai Kelurahan Sadar Hukum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan penghargaan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berupa Anubhawa Sasana Kelurahan.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 November 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi DKI Jakarta
6. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
7. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
11. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 2366 TAHUN 2015
Tanggal 4 November 2015

DAFTAR KELURAHAN SADAR HUKUM TAHUN 2015

No.	Kota/Kabupaten	Kecamatan	Kelurahan
1.	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Sawah Besar	Pasar Baru
2.	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Menteng	Cikini
3.	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Gambir	Kebon Pala
4.	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kemayoran	Utun Panjang
5.	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Senen	Paseban
6.	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Cempaka Putih	Rawasari
7.	Kota Administrasi Jakarta Utara	Kepala Gading	Kelapa Gading Timur
8.	Kota Administrasi Jakarta Utara	Koja	Tugu Utara
9.	Kota Administrasi Jakarta Utara	Koja	Rawa Badak Utara
10.	Kota Administrasi Jakarta Utara	Penjaringan	Kapuk Muara
11.	Kota Administrasi Jakarta Barat	Cengkareng	Duri Kosambi
12.	Kota Administrasi Jakarta Barat	Tamansari	Glodok
13.	Kota Administrasi Jakarta Barat	Grogol Petamburan	Jelambar
14.	Kota Administrasi Jakarta Barat	Kalideres	Semanan
15.	Kota Administrasi Jakarta Barat	Kembangan	Meruya Selatan
16.	Kota Administrasi Jakarta Barat	Palmerah	Kota Bambu Selatan
17.	Kota Administrasi Jakarta Barat	Kebon Jeruk	Sukabumi Utara
18.	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kebayoran Baru	Selong
19.	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kebayoran Baru	Rawa Barat

No.	Kota/Kabupaten	Kecamatan	Kelurahan
20.	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kebayoran Baru	Melawai
21.	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Setiabudi	Karet Kuningan
22.	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Setiabudi	Guntur
23.	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Setiabudi	Karet
24.	Kota Administrasi Jakarta Timur	Jatinegara	Cipinang Besar Utara
25.	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kramat Jati	Tengah
26.	Kota Administrasi Jakarta Timur	Matraman	Utan Kayu Selatan
27.	Kota Administrasi Jakarta Timur	Cipayung	Cipayung
28.	Kota Administrasi Jakarta Timur	Makasar	Pinang Ranti
29.	Kota Administrasi Jakarta Timur	Ciracas	Cibubur
30.	Kota Administrasi Jakarta Timur	Duren Sawit	Pondok Kelapa
31.	Kota Administrasi Jakarta Timur	Pasar Rebo	Baru
32.	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Kepulauan Seribu Utara	Pulau Kelapa
33.	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Kepulauan Seribu Utara	Pulau Panggang

GOVERNOR PROVINCE SPECIAL
 IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA